



Kesehatan Warga Dijamin Pemkot

YOGYAKARTA-Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menjamin semua warga Yogyakarta, baik yang memiliki jaminan kesehatan (Jamkes) atau tidak dapat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit dengan standar pelayanan kelas III.

Dengan jaminan itu, rumah sakit di Yogyakarta wajib memberikan layanan kesehatan tersebut.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono mengatakan, selain memberikan kepastian dalam hal pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, jaminan ini

juga untuk menghindari adanya korban jiwa karena tidak mendapatkan layanan di rumah sakit. "Jangan sampai ada warga meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan kesehatan karena sakit," kata Imam Priyono saat kegiatan Peningkatan Pe-

ran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di kelurahan Bener, Tegalrejo, kemarin.

Imam menjelaskan, jaminan ini juga sebagai bentuk komitmen Pemkot dalam memberikan perlindungan kepada warga dalam mengakses layanan dasar, termasuk untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sehingga semua permasalahan itu harus bisa ditangani dengan baik. "Semua warga akan kami lindungi. Pemkot itu ibarat seorang bapak yang sangat sayang kepada anaknya," katanya.

Saat ini pemerintah telah memberikan tiga jenis jaminan yakni jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), jaminan kesehatan sosial (Jamkesos) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Dari ketiga jenis jaminan ini masing-masing tidak sama terutama untuk pelayanannya. Namun begitu, untuk seluruh biaya tetap ditanggung Pemkot.

"Misalnya untuk biaya rawat inap, warga di kelas III dari Jamkesda 75% dan bagi warga miskin ditambah 25% dari Jamkesos, sehingga total biaya 100% akan ditanggung pemerintah," paparnya.

Direktur RS Yogyakarta Sri Aminah mengatakan, asal semua prosedur dan ketentuan terpenuhi, rumah sakit akan memberikan pelayanan kepada warga. Baik untuk layanan dasar maupun layanan medis lanjutan. Untuk layanan dasar sendiri syaratnya cukup dengan menunjukkan KTP sebagai bukti warga Yogyakarta. Sedangkan untuk layanan medis lanjutan, harus ada surat rekomendasi dari instansi terkait.

"Misalnya untuk pelayanan Jamkesmas, harus ada surat rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Dinsosnakertrans) Yogyakarta. Sebab bila tanpa itu, hanya mendapatkan layanan kategori Jamkesda. Dimana untuk pelayanannya tidak penuh," terangnya.

Wakil ketua Komisi D DPRD Yogyakarta Rifki Listiyanto mengatakan karena masalah kesehatan ini sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga agar persoalan jaminan kesehatan ini sampai di masyarakat, maka perlu adanya sosialisasi. Sebab selama ini banyak program yang tidak sampai ke masyarakat, karena kurangnya sosialisasi.

● priyo setyawan

k Lanjut

☐ Negatif

☐ Amat Segera

☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat			
4. Kelurahan Bener			
5. UPT. Jamkesda			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

